



PERAN VITAL DIPLOMASI MARITIM DALAM MENJAGA STABILITAS LAUT INDONESIA

Said Musayyab, Rudy Sutanto, Harjo Susmoro

Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan RI, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran diplomasi maritim dalam menjaga stabilitas dan keamanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan maritim, termasuk penangkapan ikan ilegal, perompakan, dan sengketa wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum di laut, mendorong kerja sama internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan melestarikan lingkungan laut. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi diplomasi maritim, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi dan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu maritim. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas diplomatik dan maritim Indonesia untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia.

Kata Kunci: Diplomasi, Maritim, Stabilitas laut.

PENDAHULUAN

Hamparan pulau-pulau yang luas dan wilayah yang didominasi laut menjadikan status Indonesia sebagai negara maritim. Karena sebagian besar perbatasannya terdiri dari lautan, Indonesia harus memiliki armada yang kuat untuk menjamin keamanan maritim di sepanjang perbatasannya. Indonesia

memiliki peran strategis dalam perdagangan global, terutama karena posisi geografisnya yang unik. Sebagian besar perairan Asia Tenggara berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Negara ini juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang merupakan salah satu rute pelayaran dan perdagangan internasional terpadat di dunia. Selain

itu, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Untuk melindungi kepentingan nasionalnya di bidang pertahanan, Indonesia menerapkan kebijakan diplomasi pertahanan maritim sebagai salah satu strategi utamanya (Munandar, 2021).

Dengan status sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat maritim global. Negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang membentang sepanjang lebih dari 108.000 kilometer. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Strategi ini meliputi peningkatan konektivitas maritim dan penguatan keamanan laut untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Sektor maritim Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang signifikan, terutama dalam bidang perikanan, pariwisata bahari, serta pengembangan industri farmasi dan suplemen kesehatan yang memanfaatkan kekayaan biodiversitas laut. Presiden Jokowi juga menekankan peran krusial ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong kemajuan industri pelayaran domestik dan jasa logistik internasional. (Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2021).

Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas lautnya, termasuk penangkapan ikan ilegal, perompakan, dan pencemaran laut. Penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna, misalnya, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan biaya yang sangat besar bagi negara. Selain itu, perompakan dan pencemaran laut juga merupakan ancaman serius bagi keamanan laut Indonesia. Konflik di Laut Cina Selatan, yang melibatkan klaim wilayah yang tidak terpecahkan, juga dapat mempengaruhi stabilitas laut Indonesia

dan keamanan regional (Pudjiastuti, Putra, & Susilo, 2021).

Diplomasi maritim menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas laut Indonesia. Dengan diplomasi maritim, Indonesia dapat memperkuat hubungan internasional dan mempromosikan keamanan dan stabilitas di wilayah maritimnya. Indonesia juga perlu meningkatkan manajemen dan promosi pelabuhan perdagangan, termasuk Jakarta dan Surabaya, serta pelabuhan lainnya sebagai hub global maritim. Dengan meningkatkan keamanan dan kestabilan laut, Indonesia dapat mempertahankan kerja sama internasional yang progresif dan menguntungkan (Nugraha & Sudirman, 2016).

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur. Peneliti mengumpulkan data dari beragam sumber literatur dan menginterpretasikannya menggunakan perspektif ilmiah. Karakteristik penelitian deskriptif kualitatif adalah penyajian data secara apa adanya, tanpa manipulasi atau intervensi apapun. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang suatu peristiwa atau untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena tertentu (Rusandi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Christian Le Miere (2014) mendefinisikan diplomasi sebagai pengelolaan relasi antarnegara. Berdasarkan definisi ini, ia memaknai diplomasi maritim sebagai upaya mengelola hubungan internasional melalui ranah kelautan. Konsep diplomasi maritim ini lebih luas dari sekadar penggunaan aset-aset kelautan untuk mengatasi konflik atau ketegangan di wilayah maritim, yang umumnya ditangani melalui hukum laut internasional. Sebaliknya, diplomasi

maritim mencakup pemanfaatan sumber daya maritim secara komprehensif untuk membina dan mengatur hubungan antarnegara (Setiawan & Zaman, 2020).

Diplomasi maritim dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya dan kapabilitas maritim suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional melalui cara-cara diplomatik. Ini melibatkan penggunaan aset dan kekuatan maritim untuk memajukan kepentingan negara di arena internasional (Hadiningrat, 2020).

Posisi strategis Indonesia sebagai jembatan antara benua Asia dan Australia, serta penghubung Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur yang membelah perairan nasional. Status ALKI yang setara dengan laut bebas membuka potensi ancaman keamanan. Saat ini, berbagai kapal dan pesawat asing bebas melintasi wilayah Indonesia melalui ALKI, menciptakan tantangan keamanan bagi pemerintah (Hutagalung, 2017). Mengingat situasi ini, sudah selayaknya Indonesia mengambil langkah fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan lautnya secara optimal. Negara perlu membangun identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi geografisnya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menjaga keamanan kawasan. Upaya ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Diplomasi maritim memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di laut, terutama dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dan perompakan. Melalui kerja sama internasional dan perjanjian bilateral atau multilateral, negara-negara dapat mengkoordinasikan upaya mereka untuk mengawasi dan menegakkan hukum di wilayah maritim yang luas. Diplomasi

maritim memfasilitasi pertukaran informasi, pembagian sumber daya, dan pelaksanaan operasi bersama antara angkatan laut dan penjaga pantai berbagai negara, yang sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal di laut.

Kementerian Luar Negeri memiliki tugas utama melaksanakan diplomasi untuk menangani urusan pemerintahan di bidang politik dan diplomatik. Namun, dalam menangani isu-isu kompleks seperti Laut Natuna Utara, diperlukan kolaborasi dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah Indonesia lainnya. Pada 14 Juli 2017, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan merilis peta baru yang mengubah nama bagian Laut China Selatan yang masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Tindakan ini dipandang sebagai upaya diplomatik untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Laut Natuna Utara, dengan posisinya yang strategis, menghadapi ancaman penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal swasta maupun kapal berbendera asing. Situasi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan dan pengamanan wilayah tersebut (Juanita, Supartono, & Purwanto, 2021).

Dalam konteks penangkapan ikan ilegal, diplomasi maritim dapat membantu dalam pengembangan dan implementasi rezim manajemen perikanan regional, serta memperkuat kapasitas negara-negara berkembang untuk melindungi sumber daya laut mereka. Sementara itu, dalam memerangi perompakan, diplomasi maritim telah terbukti efektif dalam mengkoordinasikan patroli multinasional, seperti yang terlihat di lepas pantai Somalia. Diplomasi juga berperan dalam mengatasi akar penyebab perompakan dengan mendorong pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di negara-negara pantai

yang rentan. Dengan demikian, diplomasi maritim tidak hanya berfokus pada penegakan hukum langsung, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang lebih aman dan stabil di wilayah maritim secara keseluruhan.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam bersaing di tingkat global dalam hal kebijakan, kekuatan militer, dan kemampuan diplomasi. Padahal, Indonesia sebenarnya berpotensi menjadi pusat dari ketiga aspek tersebut. Negara ini seharusnya sudah mampu memperkuat infrastrukturnya, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan di sektor ekonomi, kelautan dan perikanan, serta energi. Untuk mewujudkan visi Global Maritime Fulcrum yang sangat strategis bagi masa depan maritim dunia, Indonesia perlu memaksimalkan upayanya dan berfokus pada kerja sama yang terintegrasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi melalui pendidikan dan penelitian sangat penting. Selain itu, Indonesia juga perlu menjalin kerja sama penelitian pertahanan dan keamanan di sektor maritim dengan negara-negara lain (Nugraha & Sudirman, 2016).

Diplomasi maritim memainkan peran krusial dalam mendorong kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah maritim bersama. Dalam konteks pengamanan laut, diplomasi maritim memfasilitasi pembentukan perjanjian dan mekanisme kerja sama yang memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi intelijen, melakukan patroli gabungan, dan mengkoordinasikan respons terhadap ancaman keamanan transnasional. Misalnya, melalui forum-forum regional seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)* atau *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, negara-negara dapat mengembangkan strategi bersama untuk memerangi pembajakan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya di laut. Diplomasi juga berperan

dalam membangun kapasitas negara-negara yang lebih lemah dalam penegakan hukum maritim, melalui program pelatihan bersama dan transfer teknologi.

Presiden Jokowi telah memasukkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia ke dalam Nawacita, dengan diplomasi maritim sebagai salah satu pilar utamanya. Diplomasi maritim ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama maritim antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Nawacita adalah sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu poin pentingnya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan potensi maritim Indonesia. Pemerintah Indonesia aktif menjalankan diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari mitra regional dan internasional dalam upaya pembangunan infrastruktur maritim. Melalui diplomasi maritim, pemerintah berupaya menjaga kedaulatan negara dengan beberapa strategi, antara lain: Mempercepat negosiasi penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga. Meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar. Dan mengamankan sumber daya kelautan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Birahayu, 2019). Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengatasi berbagai sumber konflik maritim, termasuk penangkapan ikan ilegal, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, dan kerusakan lingkungan laut.

Dalam hal pelestarian lingkungan laut, diplomasi maritim memfasilitasi negosiasi dan implementasi perjanjian internasional untuk melindungi ekosistem laut dan mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Contohnya termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan berbagai perjanjian regional untuk mengurangi polusi laut dan melindungi keanekaragaman hayati.

Diplomasi maritim juga mendorong pembentukan kawasan konservasi laut lintas batas dan koordinasi penelitian ilmiah kelautan internasional. Melalui forum-forum seperti Konferensi Kelautan PBB, negara-negara dapat berkolaborasi dalam mengembangkan solusi inovatif untuk masalah seperti sampah plastik di laut, perubahan iklim, dan *overfishing*. Dengan memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan menciptakan kerangka kerja untuk aksi kolektif, diplomasi maritim membantu negara-negara mengatasi tantangan maritim yang kompleks dan lintas batas, yang tidak mungkin diatasi secara unilateral.

Diplomasi maritim memainkan peran vital dalam menyelesaikan sengketa maritim antar negara secara damai. Melalui pendekatan diplomatik, negara-negara yang terlibat dalam sengketa dapat terlibat dalam dialog konstruktif, negosiasi, dan mediasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Diplomasi maritim menyediakan platform bagi para pihak untuk menyampaikan klaim mereka, memahami posisi masing-masing, dan mengeksplorasi opsi penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini sering melibatkan pertukaran data ilmiah, penafsiran hukum internasional, dan pertimbangan kepentingan ekonomi serta keamanan masing-masing negara.

Misal Konflik di Laut China Selatan terus berlanjut karena sikap China yang semakin tegas dalam memperluas wilayahnya melalui doktrin "nine-dash line". Doktrin ini bertentangan dengan klaim wilayah maritim beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam, terutama di kawasan Kepulauan Spratly. Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum terkendala oleh perbedaan mendasar dalam interpretasi hukum laut. China berpegang teguh pada klaim historis

yang tidak diakui secara internasional, sementara negara-negara ASEAN mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai dasar hukum yang berlaku universal (Juanita, Supartono, & Purwanto, 2021).

Dalam upaya penyelesaian sengketa, diplomasi maritim dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk negosiasi bilateral langsung, mediasi oleh pihak ketiga yang netral, atau penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Diplomasi maritim juga dapat mendorong pembentukan rezim pengelolaan bersama atau zona kerja sama ekonomi di wilayah yang disengketakan, yang memungkinkan negara-negara untuk mengesampingkan perbedaan kedaulatan mereka dan fokus pada manfaat bersama dari sumber daya maritim. Dengan memprioritaskan dialog dan kerja sama daripada konfrontasi, diplomasi maritim membantu mengurangi ketegangan, membangun kepercayaan, dan menciptakan solusi jangka panjang yang berkontribusi pada stabilitas regional dan keamanan maritim global.

Tantangan dalam pelaksanaan diplomasi maritim di Indonesia meliputi kurangnya sumber daya dan koordinasi antar instansi pemerintah, kompleksitas dan dinamika masalah maritim, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya laut. Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kerja sama antar instansi, dan edukasi publik.

Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya maritim dan koordinasi antar instansi pemerintah. Kurangnya sumber daya dan koordinasi ini menyebabkan kebingungan dalam penerapan kebijakan diplomasi maritim, terlihat dalam kasus penangkapan kapal asing di

wilayah perairan Laut Natuna Utara. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen-KKP), TNI AL, dan Polri, dalam penanganan masalah maritim. Kompleksitas dan dinamika masalah maritim, seperti praktik IUU *fishing*, menuntut diplomasi maritim yang lebih efektif. Indonesia telah berkomitmen untuk memerangi IUU *fishing* melalui kerja sama regional dan forum internasional, seperti RPOA-IUU. Namun, tantangan ini tetap signifikan karena diperlukan koordinasi yang erat antar lembaga dan pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Satgas 115 (Rahman, Perwita, & Rishdianto, 2024).

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya laut sangat penting dalam pelaksanaan diplomasi maritim. Masyarakat harus diinformasikan tentang potensi ekonomi dan lingkungan yang dimiliki laut, serta peran mereka dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi publik yang komprehensif dan berkesinambungan (UNPAR, 2016). Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, mengatasi permasalahan maritim, dan memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi maritim yang lebih komprehensif.

SIMPULAN

Diplomasi maritim terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengelola berbagai aspek urusan maritim internasional. Melalui fasilitasi dialog, negosiasi, dan kerja sama, diplomasi maritim membantu negara-negara dalam menegakkan hukum di laut, mengatasi masalah bersama seperti keamanan maritim dan pelestarian lingkungan laut, serta menyelesaikan sengketa secara damai. Keberhasilan diplomasi maritim terletak pada

kemampuannya untuk membangun kepercayaan, menciptakan kerangka kerja untuk aksi kolektif, dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Dalam menghadapi tantangan maritim global yang semakin kompleks, peran diplomasi maritim akan terus menjadi semakin penting. Oleh karena itu, negara-negara perlu terus memperkuat kapasitas diplomasi maritim mereka dan berkomitmen pada pendekatan kolaboratif dalam mengelola urusan kelautan internasional.

Diplomasi maritim merupakan instrumen penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi maritimnya. Melalui diplomasi maritim, Indonesia dapat memperkuat keamanan laut, menyelesaikan sengketa perbatasan, memerangi kejahatan transnasional, dan melindungi sumber daya lautnya. Namun, efektivitas diplomasi maritim Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk koordinasi antar lembaga yang belum optimal dan kurangnya kesadaran publik.

Untuk meningkatkan efektivitas diplomasi maritimnya, Indonesia perlu:

1. Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah terkait isu maritim.
2. Meningkatkan kapasitas diplomatik dan maritim, termasuk sumber daya manusia dan teknologi.
3. Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional dalam mengatasi tantangan maritim.
4. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya sektor maritim melalui edukasi yang komprehensif.
5. Mengembangkan strategi diplomasi maritim yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi kepentingan maritimnya dan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan maritim regional serta global.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tak ada yang patut mendapatkan puji syukur melainkan Tuhan Yang Maha Perkasa, yang mengatur segala urusan di muka bumi ini. Manusia hanya punya rencana, sedangkan Dia-lah yang menentukan. Pada akhirnya saya bisa menyelesaikan Artikel ini yaitu Peran vital Diplomasi Maritim dalam Menjaga Stabilitas Laut Indonesia. Saya juga berterimakasih kepada dosen dan seluruh teman-teman yang terlibat dalam pembuatan artikel ini sehingga dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Birahayu, D. (2019). Hambatan Hukum Dalam diplomasi Maritim Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelautan. *Perspektif Hukum, Vol. 1 No.1*, 108.

Hadiningrat, J. K. (2020). Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia Vol. 8, No1*, 98-109.

Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan pelayarandi Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies Vol. 1, No. 1*, 85.

Juanita, M. D., Supartono, & Purwanto. (2021). Peran Diplomasi Maritim Dalam Menangani Krisis Di Laut Natuna Utara Antara Indonesia-China. *Jurnal Keamanan Maritim Vol. 7, No. 1*, 68-93.

Munandar, A. P. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 13. No 1*, 84.

Nugraha, M. H., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik Vol.1, No.2*, 175-182.

Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. (2021, September 23). *Indonesia Has Enormous Potential to Become Global Maritime Axis, President Jokowi Says*. Diambil kembali dari Cabinet Secretariat Of The Republic Of Indonesia: <https://setkab.go.id/en/indonesia-has-enormous-potential-to-become-global-maritime-axis-president-jokowi-says/>

Pudjiastuti, E., Putra, I., & Susilo, A. (2021). Vision Of The World Maritime Axis Of Indonesia As A Maritime Country In Alfred Thayer Mahan'S Perspective . *Journal of Defense Resources Management Vol. 12, No. 2*, 217-228.

Rahman, L. L., Perwita, A. A., & Rishdianto, A. (2024). Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8, No. 1*, 1-7.

Setiawan, A., & Zaman, A. N. (2020). *Diplomasi Maritim Dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019*. Jakarta: UM Jakarta Press.

UNPAR. (2016, September 23). *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Bagaimana Tantangan dan Perkembangannya?* Diambil kembali dari Universitas Katolik Parahyangan: <https://unpar.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-bagaimana-tantangan-dan-perkembangannya/>